BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Provinsi Jawa Barat

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (Staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 Tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon. Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 584 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

3.1.1.1 Visi Provinsi Jawa Barat

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui pembaharuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pelibatan potensi masyarakat tersebut antara lain ditempuh melalui berbagai dialog, seperti dialog sunda 2010, dialog Jawa Barat 2010, dialog rencana regional makro, dialog rencana tata ruang wilayah, dialog pemberdayaan ekonomi rakyat, dan dialog delapan kawasan andalan yang diikuti oleh unsur masyarakat, pakar perguruan tinggi, dan birokrat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga, dilaksanakan pula forum koordinasi pembangunan sebagai formulasi baru RAKORBANG dengan nuansa dan semangat yang baru, serta diawali dari motivasi untuk lebih menyerap aspirasi Kabupaten/Kota dan masyarakat. Setelah mengalami proses yang panjang dan telaahan yang mendalam

dari berbagai pihak terkait dalam dialog-dialog interaktif, maka diformulasikan visi Jawa Barat yaitu:

"JAWA BARAT DENGAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI PROVINSI TERMAJU DI INDONESIA DAN MITRA TERDEPAN IBU KOTA NEGARA TAHUN 2010"

Pada penetapan visi tersebut didasarkan kepada beberapa pengertian yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat terutama Penyelenggara Negara, para elit politik, para cendekiawan dan pemuka masyarakat, harus bersatu dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Jawa Barat sudah selayaknya berupaya menjadi Provinsi ternaju di Indonesia mengingat banyaknya potensi baik berskala daerah maupun berskala nasional. Seperti; potensi industri strategis, potensi perguruan tinggi, dukungan sumber daya alam, faktor iklim dan budaya gotong royong dan ditunjang oleh kehidupan masyarakat yang agamis.

Pengertian ***termaju*** memberi implikasi munculnya ketergantungan provinsi-provinsi lain kepada Jawa Barat. Sedangkan ketergantungan Provinsi Jawa Barat kepada provinsi lain diusahakan sekecil mungkin. Provinsi Jawa Barat selama ini dijadikan sebagai penyangga ibu Kota Negara dengan segala konsekuensinya harus bergeser dan menjadi mitra terdepan yang dilandasi dengan asas kesetaraan dan kesepahaman dalam arti tidak lagi terekploitasi segala potensinya.

3.1.1.2 Misi Provinsi Jawa Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Jawa Barat dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan

pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan berlanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap isu-isu ini mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penangan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka telah dirumuskan beberapa misi dengan rincian sebagaimana berikut dibawah ini :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

3.1.2 Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

3.1.2.1 Sejarah Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat ditetapkan dengan keputusan Gubernur 2003 mengacu kepada keputusan Presiden Sebelum terbentuknya BNP Jawa Barat, wadah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di tanda tanggani oleh Badan Koordinasi Pelaksana Daerah (BAKOLAKDA) Inpres Nomor 6 tahun 1971 sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Barat tanggal 19 Oktober 1978 Nomor 1003/DK.100-As.I/SK/78 tentang Badan Koordinasi Pelakasanaan Daerah (BAKOLAKDA) Inpres 6/71 Jawa Barat.

Pada Tahun 1995 sesuai Instruksi Presiden BAKOLAKDA Inpres No 6/71 dibubarkan sehingga dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ditangani oleh masing-masing sector dan pada tahun 1997 untuk mengkoordinir atau membentuk wadah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Gubernur Jawa Barat melalui biro bina social mengadakan semiloka dengan mengundang Dinas atau Instansi, Lembaga terkait serta LSM, organisasi sosial, para pakar cenndikiawan dan tokoh masyarakat, tokoh agama dll. Sehingga terbentuklah wadah yang diberi nama Badan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Kenakalan Remaja dan Prostitusi (BKND) Provinsi Jawa Barat. Yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pada Tahun 2000 sesuai Keputusan dari Pusat bahwa Badan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di seluruh Provinsi harus di sesuaikan nomenklatur menjadi Badan Narkotika Daerah (BND). Sehingga Badan yang dibentuk di Jawa Barat yaitu Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Kenakalan Remaja dan Prostitusi (BKND) Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Narkotika Daerah (BND) Provinsi Jawa Barat.

Dengan keputusan bersama tersebut diatas, dimana nomenklatur Badan Narkotika Daerah (BND). Seluruh Provinsi di Indonesia harus diubah nomenklaturnya menjadi Badan Narkotika Provinsi (BNP) ditetapkan oleh Gubernur dan di Kabupaten Kota menjadi Badan Narkotika Kota atau Kabupaten (BNK) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, termaksuk di Jawa Barat

disesuaikan juga nomenklaturnya menjadi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan oleh surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 135,1/Kep.1110-Bangsos/2003 tanggal 29 Desember 2003.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: 04/SKB/M.PAN/12/2003; Nomor: 127 Tahun 2003 dan Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

3.1.2.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

A. Visi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Adapun Visi dari Badan Narkotika Provinsi Jawa Baratyaitu:“BNP sebagai pilar utama Jawa Barat bebas penyalahgunaan narkoba tahun 2015”.

B. Misi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Adapun Misi dari Badan Narkotika Provinsi Jawa Baratadalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;
2. Melaksanakan pengawasan untuk imigrasi/kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan

pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;

3. Melaksanakan pencegahan dan penegakkan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (komplek perumahan TNI, POLRI dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran;
4. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;

3.1.2.3 Fungsi dan Tugas Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

A. Fungsi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Adapun fungsi dari Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;

2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, Polri dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut kecuali Tanjung Priok, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.
4. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

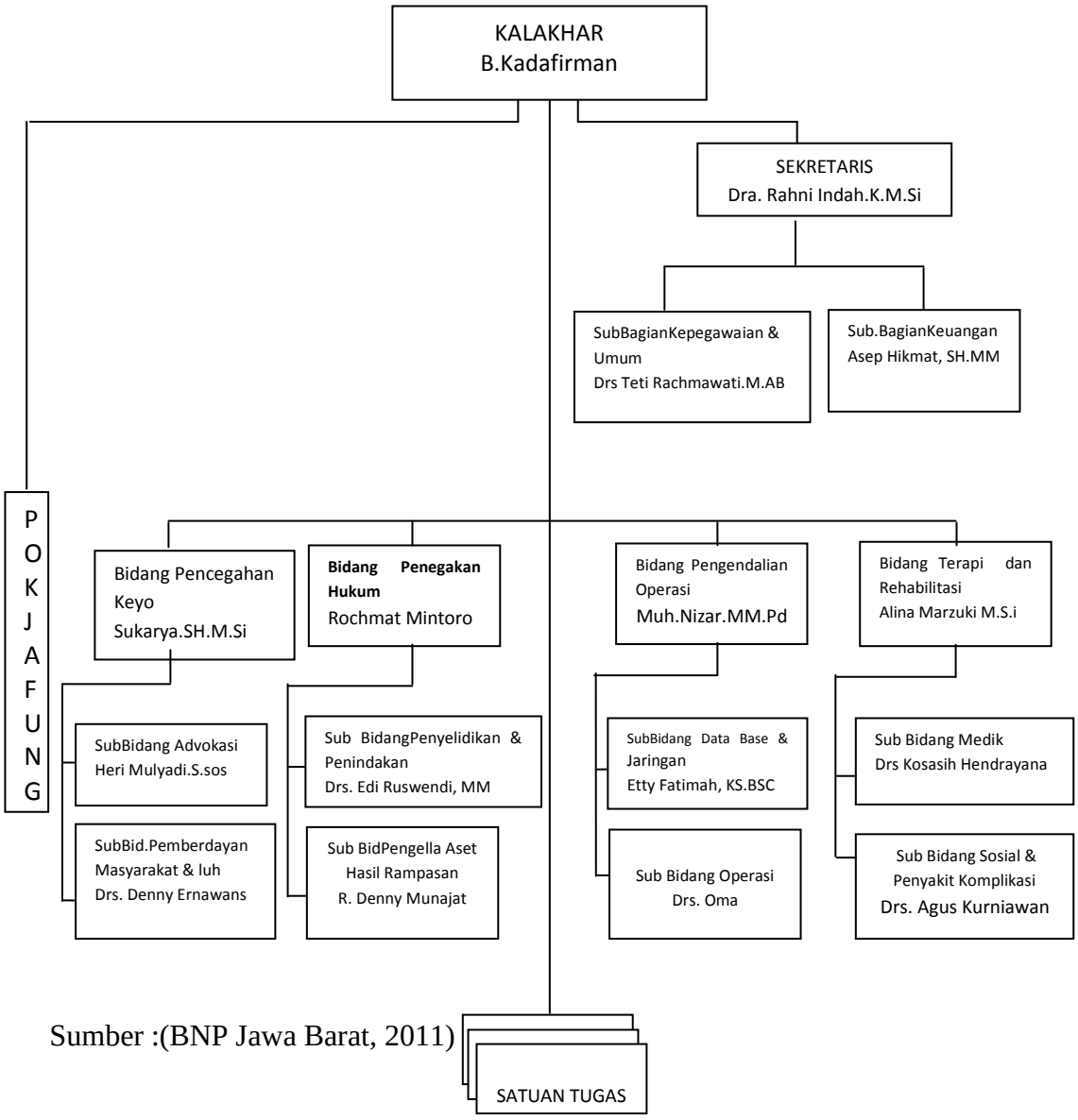
B. Tujuan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

3.1.2.4 Struktur OrganisasiBadan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Penerapan PP Nomor 41 Tahun 2008 telah membentuk kelembagaan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat:

Bagan 3.1
Struktur Organisasi
Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat



Sumber :(BNP Jawa Barat, 2011)

3.1.3 Gambaran Umum *e-library* P4GN Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Aplikasi *e-library* merupakan sarana penunjang bagi pemanfaatan Call Centre Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Keberadaan Call Centre itu sendiri merupakan sarana komunikasi dua arah (*Two Way Traffic Communications*) antara Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan sosialisasi maupun informasi seputar Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan keberadaan Call Centre ini dirasakan sangat membantu peran aktif masyarakat Jawa Barat untuk saling bertukar pikiran mengenai masalah narkoba baik di kalangan orang tua maupun remaja/generasi muda.

Banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini berdampak pada banyaknya korban narkoba di masyarakat karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara berkesinambungan kepada masyarakat, yang mengakibatkan para korban narkoba khususnya generasi muda menjadi angkatan kerja yang tidak produktif dan terjadi lost generation dimasa yang akan datang.

Bertitik tolak dari permaslahan tersebut di atas, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dipandang perlu untuk sesegera mungkin berperan aktif, inovatif, kreatif dan interaktif memanfaatkan sarana Call Centre sebagai sarana yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat serta terkini tentang P4GN. Untuk mengoptimalkan pelayanan petugas Call Centre Sekretariat

Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat, penggunaan Aplikasi *E-Library* dirasakan sangat membantu petugas dalam menjawab setiap keluhan atau pertanyaan dari masyarakat.

3.1.3.1 Tujuan *e-library*

Terwujudnya Call Centre Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat didalam sosialisasi dan informasi tentang permasalahan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Barat.

3.1.3.2 Cara Menjalankan Aplikasi *e-library* P4GN

Perkembangan pelayanan informasi pemerintah pada masa kini terhitung cepat.Hal ini disebabkan intansi-intansi pemerintah berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.*E-library* P4GN merupakan aplikasi pelayanan informasi BNP Jabar yang didalamnya terdapat beberapa konten dengan fungsi dan cara pengoperasian yang berbeda. Untuk menjalankan konten yang ada didalam *e-library* P4GN ada beberapa petunjuk atau gambaran yang harus kita ketahui terlebih dahulu.

Gambaran dan petunjuk untuk mengoperasikan *e-library* P4GN terdapat pada website BNP Jabar.

Berikut adalah beberapa gambaran dari aplikasi *e-library P4GN*.

Gambar 3.1
Tampilan Awal Website BNP Jawa Barat



Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010

Pada website *www.bnpjabar.or.id* pilih menu *e-library* P4GN maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

LEVEL USER

Pada aplikasi *e-library* Call Centre P4GN dibagi 3 level yaitu:

1. User Administrator

   Untuk user administrator memiliki autoritas penuh untuk menambah, mengedit dan menghapus data-data customer dan data artikel yang terdapat pada Aplikasi *e-libraryCall Centre* P4GN.

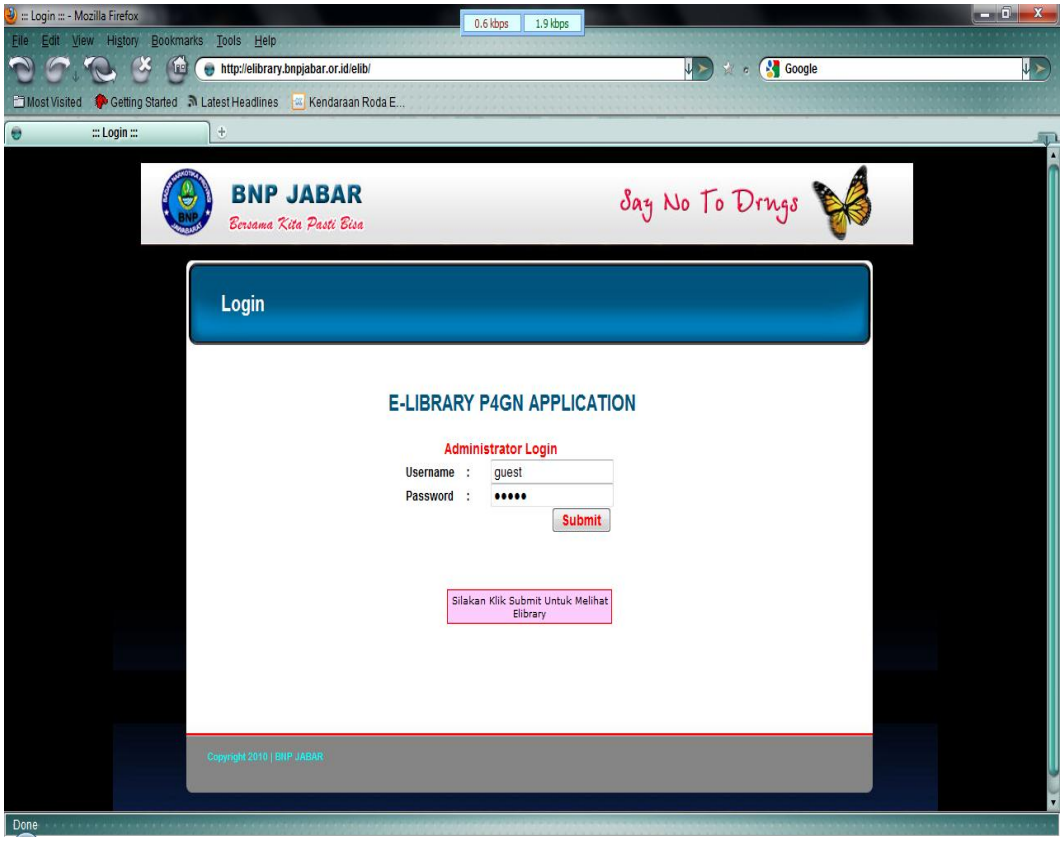
2. User Operator

   Untuk user Operator hanya memililki autoritas menambah dan mengedit data-data customer dan data artikel yang terdapat pada aplikasi *e-library* P4GN.

3. User Guess

   Untuk user guess hanya diberikan autoritas untuk melihat saja artikel-artikel pada aplikasi *e-library* P4GN

Gambar 3.2
Tampilan Default Username Menu Aplikasi *e-library* P4GN

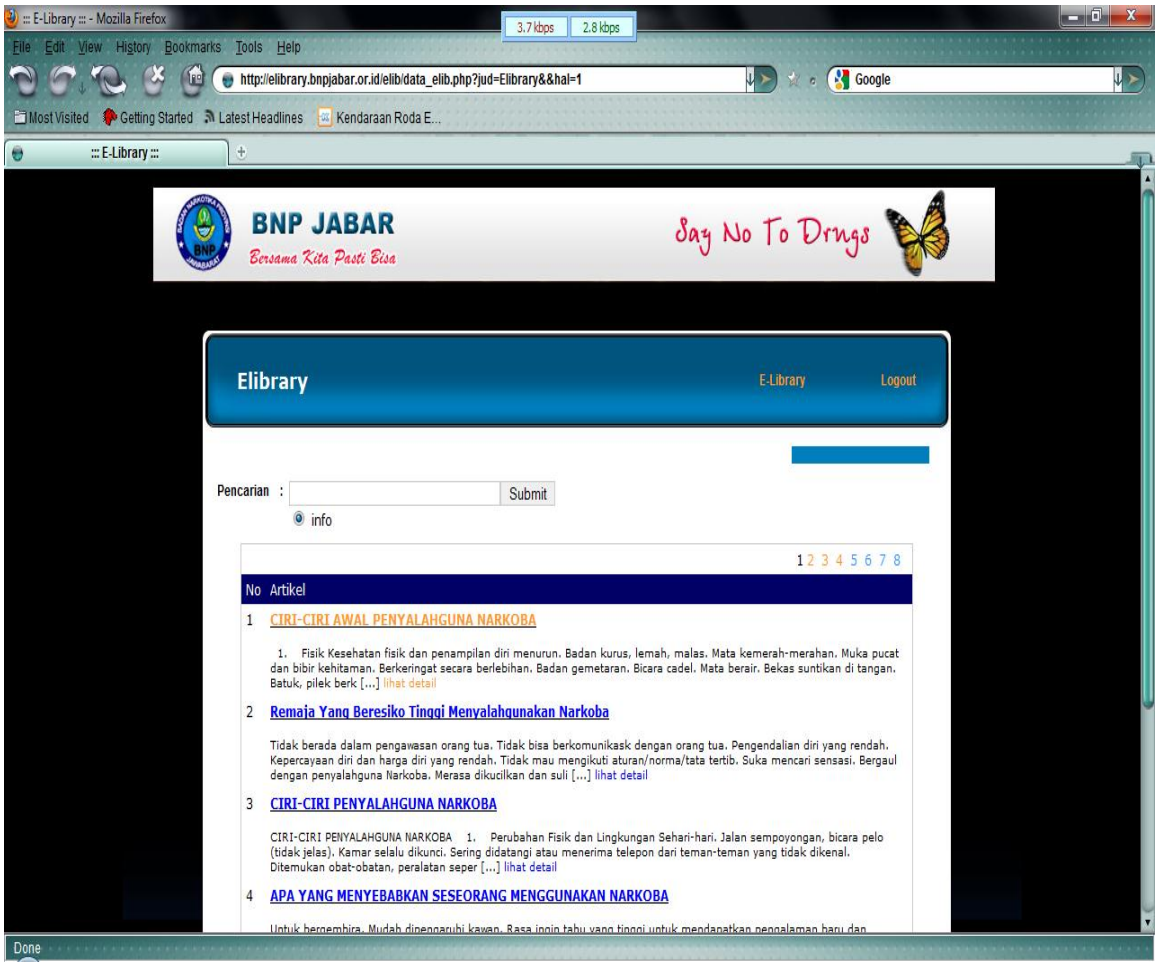


Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Masukan username dan password. Tampilan default username menu Aplikasi *e-library* P4GN adalah username guess dimana user tersebut hanya bisa melihat isi database P4GN, tidak diberikan akses untuk menggunakan fitur-fitur yang ada pada menu *e-library*.

Berikut adalah tampilan menu Aplikasi *e-library* dengan menggunakan username guess

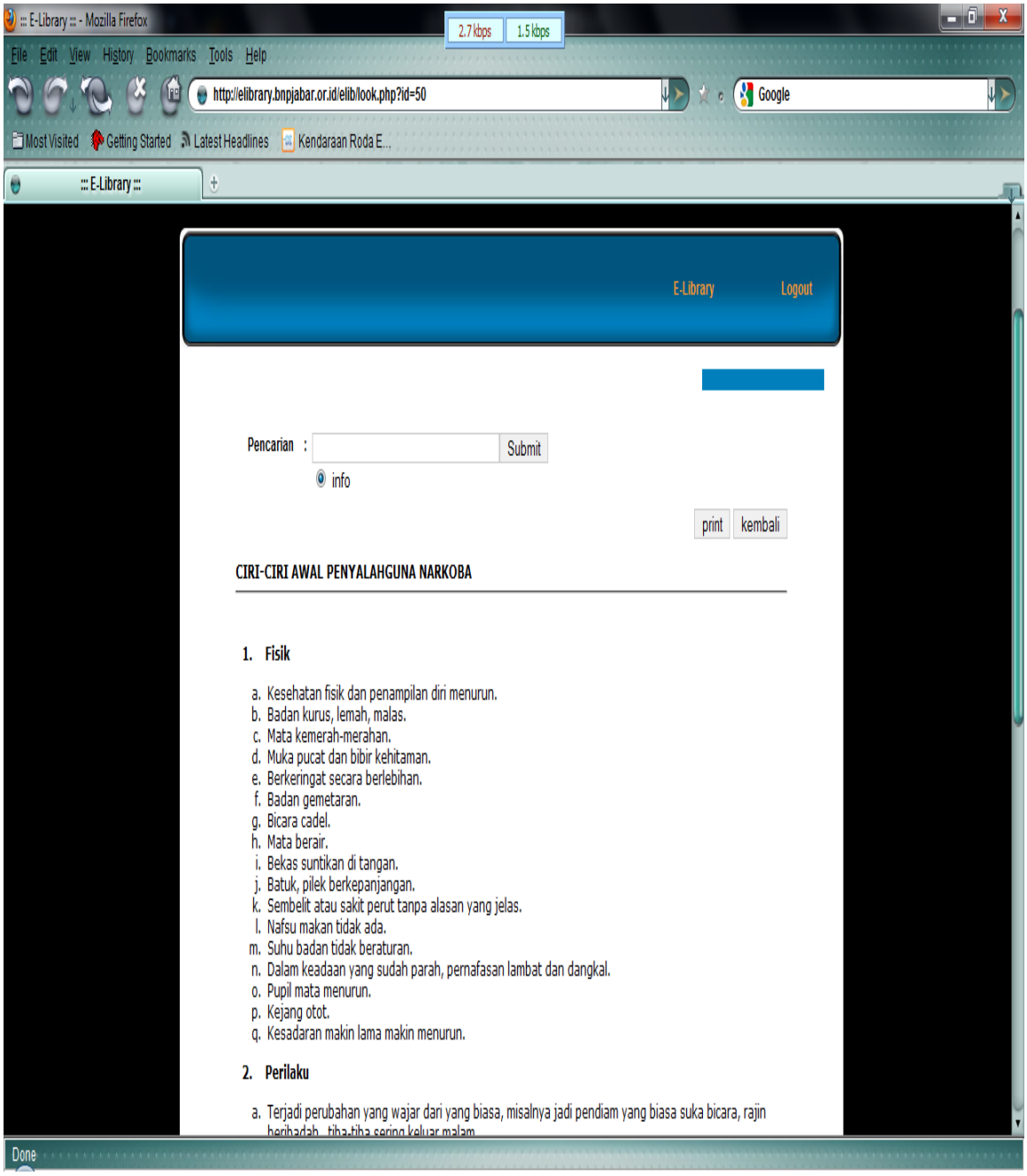
Gambar 3.3
Tampilan Artikel



Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Jika diklik salah satu artikel yang terdapat pada *e-library* maka akan muncul detail artikel tersebut.

Gambar 3.4
Menu Print Pada Menu Detail Artikel



Sumber : (BNP Jawa Barat, 2010)

Menu Print pada menu detail artikel berfungsi untuk mencetak artikel dan menu kembali berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kinerja aparatur BNP Jabar dalam mengoperasikan *e-library* P4GN, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah *e-library* P4GN tersebut.Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari tingkahlaku manusia, khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapatn memahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Kegiatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis tentang*e-library* P4GN.Peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penggunaan *e-library* P4GN terhadap masyarakat agar penelitian dapatmenyelesaikan usulan penelitian ini, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Peninjauan yang dilakukan langsung pada Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date*, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi non partisipan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan. Peneliti meneliti tentang kinerja aparatur BNP Jabar dalam mengoperasikan *e-library* P4GN terhadap masyarakat Jawa Barat.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terstruktur dengan alat bantu berupa laptop dan catatan-catatan lainnya. Untuk menggali informasi tambahan dari informan, peneliti melakukan dialog melalui tatap muka dengan cara merekam percakapan, telepon, *email* dan media *access* lainya.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive*. Teknik penentuan informan yang telah ditentukan oleh bidang yang menangani *e-library* P4GN yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian.Informan dalam penelitian ini terdiri informan yang berkaitan dengan kinerja aparatur BNP Jabar dalam mengoperasikan *e-library* P4GN.Pengambilan informan penelitian yang berkaitan dengan kinerja aparatur berasal dari pejabat maupun pegawai Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.

Pertimbangan penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan sesuai dengan informan yang bersangkutan dalam *e-library* P4GN, ada dua penentuan yang dijadikan sebagai informan, yaitu:

Informan Aparatur:

1. Drs.Muhammad Nizar,MM.PD yaitu sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan *e-library*.
2. Drs Oma yaitu sebagai yang bertanggung jawab memberikan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi setiap aparaturnya ketika mengoperasikan *e-library* P4GN.

3. Anne Suciati yaitu sebagai operator dalam menjalan *e-library* P4GN, karena dengan adanya operator tersebut proses berjalannya *e-library* P4GNdapat berjalan dengan lancar.
4. Drs Asep Iman Chandra Margana yaitu yang berperan sebagai teknisi, dimana terjadi sebuah *problem* atau adanya kendala terhadap perangkat *hardware* maupun *software* informan inilah yang mengatasinya.

Informan Masyarakat:

1. Rudi Haryanto yaitu sebagai pengguna *e-library* P4GN, yang mengakses dan menggunakan *e-library* P4GN ini agar mengetahui penggunaan teknologi informasi.
2. Sandi yaitu sebagai pengguna *e-library* P4GN yang juga sedang dalam masa rehabilitasi oleh BNP JABAR.
3. Alex yaitu sebagai pengguna *e-library* P4GN yang juga sedang dalam masa rehabilitasi oleh BNP JABAR.
4. Riman yaitu sebagai pengguna *e-library* P4GN yang juga sedang dalam masa rehabilitasi oleh BNP JABAR.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang peneliti ambil adalah penelitian kualitatif, yang merupakan proses untuk analisis data dalam penelitian ini. Menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya :

Pertama, Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam tentang *e-library* P4GN tersebut di Badan Narkotika

Provinsi Jawa Barat, dimana data tersebut diambil dengan alat bantu seperti media elektronik, *media access*, jejaring sosial dan lain-lain. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk tulisan dari media *access* tersebut menjadi bentuk data secara *real*. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

Kedua, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakuakan *coding*. Dengan cara ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip wawancara terhadap aparatur yang mengelola *e-library* P4GN dan melakukan perangkaian kata-kata untuk di jadikan bahan dijadikan usulan penelitian, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan terhadap aparatur Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat khusnya aparatur yang menenagani tentang *e-library* P4GN.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh aparatur. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

Ketiga, menguji asumsi atau permasalahan yang terdapat pada *e-library* P4GN terhadap datasetelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat

dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.

Keempat, mencari alternatif penjelasan data setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, peniliti merasa perlu mencari suatau *alternative* penjelasan tentang proses pelayanan *e-library* P4GN kepada masyarakat, apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya, Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada *alternative* penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya.Pada tahap ini akan dijelaskan dengan *alternative* lain melalui referensi atau teori-teori lain. *Alternatif* ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

Kelima, menulis kembali hasil penelitian penulisan data yang di dapat di Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dalam mengoperasikan *e-library* P4GN terhadap masyarakat, data-data yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakaiadalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari *e-library* P4GN dan *significant other*, dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari

subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat, khususnya Bidang pengendalian operasi yang bertugas mengoperasikan *e-library* P4GN yang beralamat di Jln. Cilaki No 51 Bandung, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, pengorganisasian, rencana operasi, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN.Bidang pengendalian operasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud mempunyai fungsi:Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pengendalian operasi;Penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi;Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi.

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan penyusunan rancangan judul pada bulan februari kemudian menyususn usulan penelitian pada bulan februari hingga maret.Setelah menyelesaikan usulan penelitian sampai Bab 3, peneliti melakukan seminar usulan penelitian pada bulan April.Setelah seminar kemudian peneliti melanjutkan pengumpulan data selama 5 bulan dari Maret hingga Juli.Setelah data lengkap selanjutnya peneliti mengolah data selama 3

bulan yang dilanjutkan dengan pembuatan skripsi.selanjutnya di uji pada sidang ujian skripsi, untuk jadwal penelitian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	2012						
	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst
Penyusunan rancangan Judul	■						
Penyusunan Usulan Penelitian	■	■					
Seminar Usulan Penelitian			■				
Pengumpulan Data		■	■	■	■	■	
Pengolahan Data				■	■	■	
Pembuatan Laporan				■	■	■	■
Sidang Ujian Skripsi						■	■